

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan infrastruktur lingkungan merupakan tantangan yang dihadapi oleh semua kota, termasuk negara berkembang. Masalah seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah menjadi perhatian utama dalam tata kelola infrastruktur lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan konsumsi makanan, yang berujung pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengelola sampah dengan tujuan utama meminimalkan akumulasi sampah dan memanfaatkannya agar tidak terbuang sia-sia (Jati, 2019). Sampah didefinisikan sebagai bahan sisa dari kegiatan sehari-hari atau proses alamiah berupa padatan organik dan anorganik (baik yang dapat terurai secara alamiah maupun yang tidak dapat terurai secara alamiah), yang dibuang ke lingkungan karena dianggap sudah tidak berharga lagi.

Masalah terkait sampah semakin kompleks akibat peningkatan volume sampah, komposisi sampah yang beragam, terbatasnya sumber daya keuangan untuk pelayanan publik, dampak pembangunan ekonomi, serta meningkatnya potensi kegiatan pengelolaan sampah. Keberadaan sampah dapat menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan penyakit seperti demam tifoid, diare, demam berdarah, dan penyakit lainnya (Simatupang & Yuliah, 2021). Saat ini, pengelolaan sampah menghadapi tekanan besar karena peningkatan volume limbah yang dihasilkan oleh masyarakat sebagai produsen dan konsumen. Masalah ini

diperburuk oleh paradigma pengelolaan yang sudah usang, yang hanya mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan.

Masalah pengelolaan sampah di Indonesia telah lama menjadi momok yang membebankan bagi pemerintah dan menghadirkan tantangan yang berat. Infrastruktur pengelolaan sampah saat ini di Indonesia umumnya dianggap belum memadai, gagal dalam mengatasi produksi sampah yang terus meningkat. Selain itu, inisiatif yang ditujukan untuk menangani masalah ini tampak kurang mendalam dan kurang berkomitmen. Temuan terbaru dari sebuah studi yang komprehensif yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia secara kolektif menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah setiap tahunnya, dengan rata-rata sekitar 92,69 kilogram per orang per tahun. Realitas yang mengkhawatirkan ini tampak nyata di lapangan, dengan tumpukan sampah yang tak terhindarkan, pencemaran air tanah akibat rembesan air lindi, badan-badan air yang tersumbat oleh sampah, kondisi yang memprihatinkan di tempat-tempat pembuangan sampah umum, logistik transportasi yang tidak efisien yang memperburuk masalah, dan maraknya praktik pembuangan sampah yang tidak aman, di antara permasalahan lainnya. Sifat kompleks dari permasalahan ini menegaskan perlunya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang luas.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk 265.015.300 jiwa, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia, dengan penambahan penduduk sebesar 1,32 juta jiwa dalam satu tahun terakhir. Tingkat konsumsi masyarakat telah meningkat sebagai

hasil dari penambahan penduduk, dan mereka menjalani kehidupan yang lebih kontemporer. Meluasnya jenis sampah, termasuk sampah kemasan berbahaya yang sulit terurai secara alami oleh lingkungan, merupakan hasil dari pola konsumsi modern. Kuantitas sampah yang dihasilkan oleh peradaban telah meningkat sebagai akibatnya. Pada tahun 2023, Indonesia akan menghasilkan lebih dari 69,8 juta ton sampah, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan perkembangan populasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah merupakan suatu sistem yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan. Sistem pengelolaan sampah bergantung pada berbagai subsistem yang ada, sehingga pemahaman dan keterkaitan antar subsistem ini sangat penting pada usaha pengelolaan sampah yang efektif (Zaharuddin et al., 2022). Urgensi pengelolaan sampah berbasis masyarakat saat ini menjadi isu publik yang memerlukan perhatian serius. Kebiasaan masyarakat yang sering kali membuang sampah atau sisa konsumsi untuk kemudian diangkut ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) dan ditimbun sesuai dengan konsep pengelolaan sampah tradisional, seringkali menimbulkan banyak masalah lingkungan dan kesehatan (Setiawan, 2021).

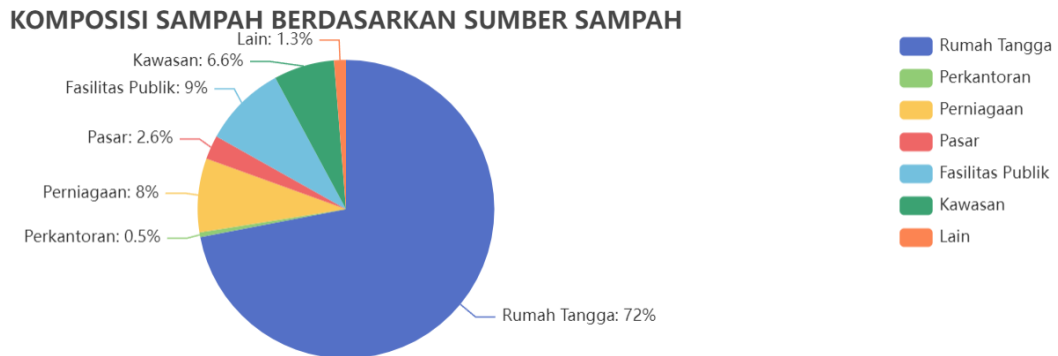
Minimalisasi sampah merupakan salah satu praktik pembuangan sampah TPA yang sulit diatur, yang diatur pada undang-undang pengelolaan sampah nomor 18 tahun 2008. Pada ayat 1 pasal 20 undang-undang nomor 18 tahun 2008 terkait pengelolaan sampah dijelaskan bahwa Konsep reuse mengacu pada tindakan

memanfaatkan kembali sampah yang praktis untuk fungsi yang sama atau berbeda. Pengurangan sampah dilakukan dengan membatasi timbulan sampah (*reduce*), mendaur ulang (*recycle*), dan menggunakan kembali (*reuse*), atau yang sekarang lebih dikenal dengan prinsip desain 3R. Daur ulang adalah proses mengelola sampah untuk menciptakan produk baru.

Di Indonesia, pengelolaan sampah, termasuk penerapan konsep *reduce, reuse, recycle* (3R), diatur oleh berbagai regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia. UU ini memberikan penekanan khusus pada prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) sebagai strategi utama untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 13 UU ini mengamanatkan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, pendaurulangan, dan pemanfaatan kembali sampah.

Di Kota Semarang, masalah sampah memerlukan penanganan segera dan serius. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang yang semakin menyusut dan hampir penuh. Volume sampah yang dibuang ke TPA ini meningkat sekitar 10 persen setiap tahunnya. Wilayah pusat kota menjadi penyumbang sampah terbesar, dengan peningkatan volume hingga 30 persen pada musim hujan dibandingkan dengan musim kemarau (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2023). Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2023, produksi sampah harian di kota ini

mencapai 1.110 ton, meningkat dari sekitar 900 ton per hari pada masa pandemi 2021-2022.



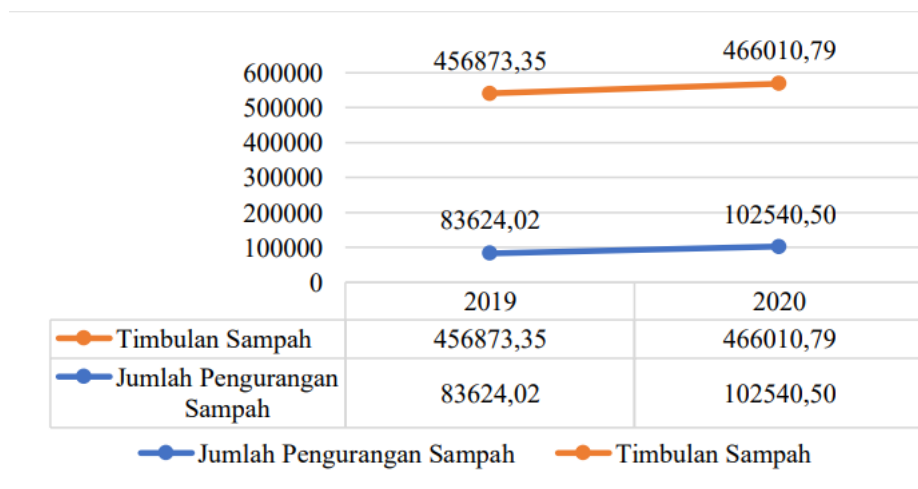
**Gambar 1. 1 Kondisi Sampah di Kota Semarang Tahun 2023**

*Sumber: sipsn.mnlhk.go.id*

Sekarang terdapat 21 TPS 3R dari 177 Kelurahan di Kota Semarang. Pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengurangan sampah di Kota Semarang. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui sosialisasi yang bertujuan agar warga lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan mampu mengurangi timbulan sampah. Dalam rangka mencapai tujuan ini, pemerintah berencana mengaktifkan Bank Sampah di setiap kelurahan. Tujuannya adalah agar setiap kelurahan minimal memiliki satu Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Dalam Pasal 17 pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 yang mengatur tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang untuk mengelola sampah. Pemerintah daerah wajib melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: 1) pembangunan dan pemeliharaan TPA, TPS, dan TPST; 2) penyediaan fasilitas dan pengangkutan sampah dari TPS, TPST ke TPA; 3) penyediaan fasilitas dan pengolahan sampah di TPA, TPS, dan TPST; 4) penyediaan fasilitas pemilahan

sampah di TPA dan TPS. Produksi sampah yang meningkat, lahan pengelolaan sampah yang sempit, dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan sampah, semuanya berkontribusi pada kompleksitas masalah. Jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari hingga tahun 2020 adalah 1.200 ton, namun tempat pengelolaan sampah seluas 46 hektar di TPA Jatibarang tidak bertambah.



**Gambar 1. 2 Pengurangan Sampah Tahun 2019-2020**

*Sumber: Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, DLH Kota Semarang 2019-2020*

Berdasarkan gambar diatas dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dibutuhkan untuk merealisasikan optimalisasi pengelolaan sampah dengan melaksanakan pengelolaan sampah melalui 3R serta memfasilitasi pembentukan TPS 3R. Dengan adanya pembangunan TPS 3R yaitu suatu upaya yang bertujuan dalam mengelola dan memberikan hasil lebih dari sampah yang dihasilkan. Tetapi, dari gambar diatas juga menunjukkan bahwa laju peningkatan sampah masi searah naik dengan jumlah pengurangan sampah yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan masih ada permasalahan yang kurang optimal dari pengelolaan sampah di Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang Tahun 2021-2026 juga dinyatakan bahwa salah satu isu permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah masih memiliki isu yaitu masih kurangnya fasilitas penunjang aksi *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) yang disebabkan oleh masihnya rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah sehingga masih banyak juga bank sampah yang masih belum berjalan dengan baik. Jika diteliti lebih lagi pada Renstra DLH Kota Semarang Tahun 2021-2026 masih hanya berfokus pada pengelolaan dan optimalisasi Bank Sampah yang dibangun berdasarkan swadaya murni masyarakat setempat, sedangkan adanya TPS 3R yang dikembangkan menggunakan anggaran negara belum terlalu mendapat perhatian secara khusus. Jika ditelaah berdasarkan tugas dan fungsinya adanya TPS 3R seharusnya menjadi fasilitas pendukung yang membantu masyarakat untuk dapat mengelola dan mengurangi peredaran sampah melalui metode 3R yang secara efektif dapat mengurangi sampah yang ada di Kota Semarang.

Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang Tahun 2021-2026 dinyatakan bahwa dalam mencapai Misi Ke 4 Kepala Daerah Kota Semarang, yaitu mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan dalam memajukan kota masih terdapat beberapa isu yang menghambat tercapainya misi tersebut dan salah satunya terdapat pada pengelolaan sampah yang berlaku. Belum sesuainya pengelolaan tempat sampah terpadu 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam hal ini menjadi kunci penting dari baik atau tidaknya pengelolaan sampah yang dalam suatu daerah dan dalam hal ini pengelolaan tempat sampah

terpadu di Kota Semarang masih belum terlaksana secara baik. Sejauh ini, peran Lembaga Swadaya Masyarakat masih menjadi faktor pendorong utama dalam pengelolaan sampah yang juga menjadi agen penggerak masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah.

Tempat Pengelolaan, Pengurangan, Penggunaan Kembali, Daur Ulang Sampah (TPS3R) Pedalangan Bersinar terletak di kawasan Jl. Tirto Agung Banyumanik Kota Semarang. Fasilitas ini dibuat karena adanya minat dari masyarakat setempat untuk memiliki TPS3R di kawasan Pedalangan, yang kemudian berkoordinasi dan mengadakan pertemuan dengan pihak kecamatan setempat serta bawahan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), yang kemudian meminta izin kepada Walikota serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan TPS3R dilaksanakan setelah dokumen disetujui dan berlangsung selama 4 bulan dan diresmikan oleh Walikota Semarang pada 21 Oktober 2021. Penanggung Jawab Utama TPS3R adalah kepala kelurahan setempat dan mempunyai masa jabatan 7 bulan terhitung April 2022.

Pada awal pelaksanaan TPS ini mendapatkan subsidi dari Kementerian PUPR sebesar Rp 12 juta untuk operasional selama 3 bulan diawal, dan sekarang didanai secara mandiri dari hasil retribusi pemanfaatan produk yang dihasilkan kurang lebih Rp 9 juta perbulan. TPS3R Pedalangan tidak hanya bergerak dibidang pengolahan sampah, namun juga mencakup bidang lain seperti peternakan ayam, *maggot* (sebagai pakan ayam), peternakan lele dan pupuk kompos. Meskipun pada awal pengoperasian masih memiliki 200 pelanggan, namun angka tersebut



meningkat setiap bulan dan setiap pelanggan dikenakan iuran sebesar Rp30.000 agar sampahnya dapat diolah di TPS 3R Pedalangan.

Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, merupakan salah satu daerah di Kota Semarang yang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Dengan jumlah penduduk sekitar 12.000 jiwa dan luas wilayah sekitar 4,5 km<sup>2</sup>, Pedalangan menghasilkan sekitar 15 ton sampah per hari. Sampah tersebut terdiri dari berbagai jenis, termasuk sampah organik, anorganik, dan limbah lainnya.

**Tabel 1.1 Data Klasifikasi Sampah di Kelurahan Pedalangan 2022**

<b>Jenis Sampah</b>	<b>Volume Harian (Ton)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Keterangan</b>
Sampah Organik	7,5	50	Sampah dapur, sisa makanan, daun
Sampah Plastik	3,0	20	Botol plastik, kantong plastik, kemasan
Sampah Kertas	1,5	10	Kertas bekas, karton, koran
Sampah Logam	1,0	6	Kaleng, besi, aluminium
Lainnya	2,0	14	Kaca, tekstil, limbah B3, dan lainnya
<b>Total</b>	<b>15,0</b>	<b>100</b>	

*Sumber: Laporan Evaluasi Pengelolaan Sampah TPS 3R Pedalangan*

Berdasarkan tabel data klasifikasi sampah di Kelurahan Pedalangan tahun 2022, sampah organik mendominasi dengan volume harian sebesar 7,5 ton atau 50% dari total sampah yang dihasilkan. Sampah organik ini sebagian besar terdiri dari sisa makanan, daun, dan sampah dapur. Sampah plastik menempati urutan kedua dengan volume harian 3,0 ton atau 20%. Plastik yang dihasilkan umumnya berasal dari botol plastik, kantong plastik, dan kemasan. Sampah kertas

menyumbang 10% dari total volume sampah harian, dengan volume 1,5 ton. Sampah kertas ini terdiri dari kertas bekas, karton, dan koran. Selanjutnya, sampah logam memiliki volume harian sebesar 1,0 ton atau 6%, yang meliputi kaleng, besi, dan aluminium. Sampah kaca dan tekstil masing-masing memiliki volume harian 0,5 ton atau 3%. Sampah kaca umumnya terdiri dari botol kaca dan pecahan kaca, sementara sampah tekstil meliputi kain bekas dan pakaian. Sampah lainnya yang mencakup limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah elektronik, dan berbagai jenis sampah lainnya menyumbang 8% dari total volume sampah harian, dengan volume 1,0 ton.

Dalam konteks regulasi, pengelolaan sampah di Kota Semarang diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mengamanatkan pengurangan sampah di sumbernya melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Namun, implementasi regulasi ini di Kelurahan Pedalangan masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum menjadi salah satu faktor penghambat utama. Banyak warga yang belum memahami atau menyadari adanya peraturan ini, sehingga partisipasi dalam program 3R masih rendah. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di tingkat kelurahan menghambat upaya penegakan regulasi ini secara efektif.

Di tingkat Kota Semarang, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah mengatur pengelolaan sampah dengan penekanan pada prinsip 3R. Perda ini mewajibkan setiap kelurahan untuk memiliki TPS 3R dan

mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah di sumbernya. Selain itu, pemerintah kota harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program 3R di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Dalam pasal 23 Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, dalam No 3 pada pasal terdapat kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan melalui:

1. Penetapan target pengurangan sampah secara bertahap
2. Pemberian fasilitas teknologi yang ramah lingkungan
3. Pemberian fasilitas label produk yang ramah lingkungan
4. Memfasilitasi kegiatan penggunaan ulang; serta
5. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Berdasarkan Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang telah dijabarkan diatas dapat diketahui bahwa masih banyak kegiatan yang berdasarkan peraturan tersebut masih belum dapat terlaksanakan secara baik. Penetapan target pengurangan sampah secara bertahap masih belum terlaksanakan secara baik, dimana berdasarkan data yang diketahui pada TPS 3R Pedalangan angka timbunan sampah masih belum mengalami pengurangan secara bertahap, serta pada poin-poin lainnya juga dapat dinilai masih kurang dampaknya akan pelaksanaan TPS 3R Pedalangan.

**Tabel 1.2. Data Pertumbuhan Penduduk dan Volume Sampah di Kelurahan  
Pedalangan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Volume Sampah Harian (Ton)</b>	<b>Volume Sampah Tahunan (Ton)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>2018</b>	10.553	12,0	4.378	Volume sampah meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk
<b>2019</b>	10.942	12,5	4.564	Rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 3% per tahun
<b>2020</b>	11.271	13,0	4.873	Volume sampah tahunan meningkat 3,8% dari tahun sebelumnya
<b>2021</b>	11.554	14,0	5.112	Peningkatan volume sampah harian mencapai 7,7% dibandingkan 2020
<b>2022</b>	12.197	15,0	5.502	Peningkatan volume sampah tahunan sebesar 7,1% dibandingkan 2021

*Sumber: Laporan Pengelola TPS 3R Pedalangan*

Dari tabel 1.2 ini dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Pedalangan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah penduduk tercatat sebanyak 10.500 jiwa dan meningkat menjadi 12.000 jiwa pada tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan penduduk tahunan di kelurahan ini adalah sekitar 3%. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Kelurahan Pedalangan merupakan daerah yang berkembang dengan populasi yang terus bertambah, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor urbanisasi dan perkembangan ekonomi lokal

yang menarik penduduk untuk bermigrasi ke daerah ini. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, volume sampah harian di Kelurahan Pedalangan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018, volume sampah harian adalah 12,0 ton dan meningkat menjadi 15,0 ton pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan sebesar 25% dalam kurun waktu lima tahun. Volume sampah tahunan juga menunjukkan tren yang sama, dengan peningkatan dari 4.380 ton pada tahun 2018 menjadi 5.475 ton pada tahun 2022, yang berarti peningkatan sebesar 25% selama periode tersebut.

Peningkatan volume sampah yang signifikan seiring dengan pertumbuhan penduduk menimbulkan tantangan besar bagi pengelolaan sampah di Kelurahan Pedalangan. Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang diimplementasikan di kelurahan ini menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Kendala tersebut meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta minimnya edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah.

**Tabel 1. 3 Data Partisipasi Masyarakat Kelurahan Pedalangan yang Melaksanakan Kegiatan Pemilahan Sampah**

<b>Kriteria Partisipasi</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga</b>	<b>Persentase</b>
Aktif Memilah Sampah	1.118	40%
Tidak Aktif Memilah Sampah	1.802	60%
<b>Total</b>	3.000	100%

*Sumber: Laporan Pengelola TPS 3R Pedalangan*

Partisipasi masyarakat merupakan komponen esensial dalam keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (3R). Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa dari total 3.000 rumah tangga di Kelurahan Pedalangan, hanya 40% yang secara aktif memilah sampah, sementara 60% sisanya tidak melakukan pemilahan. Rendahnya partisipasi ini menunjukkan kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, ketidaknyamanan dalam proses pemilahan, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Akibatnya, volume sampah yang tidak terolah meningkat, efektivitas program 3R menurun, dan biaya pengelolaan sampah bertambah.

Ketersediaan dan kualitas fasilitas TPS 3R di Kelurahan Pedalangan masih terbatas. Kapasitas TPS 3R Pedalangan yang ada hanya mampu mengangkut sekitar 2-5 ton sampah per hari, sedangkan volume sampah harian Kelurahan Pedalangan mencapai 15 ton. Selain itu, TPS 3R Pedalangan juga masih kekurangan mesin pencacah dan tempat pemilahan sampah yang memadai, sehingga proses pengelolaan sampah tidak berjalan optimal. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga

merupakan tantangan signifikan. Salah satu ketentuan penting dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 adalah kewajiban pemerintah untuk melakukan kampanye dan edukasi tentang 3R kepada masyarakat. Di Kelurahan Pedalangan, kegiatan edukasi yang dilakukan masih terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dari survei yang pengelola TPS 3R Pedalangan lakukan kepada 3 rumah tangga, hanya 25% yang menyatakan telah menerima informasi yang memadai tentang program 3R. Akibatnya, banyak warga yang belum memahami pentingnya pemilahan sampah dan manfaat dari penerapan prinsip 3R. Edukasi yang tidak merata menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam program 3R di Kelurahan Pedalangan masih rendah. Meskipun Perda mewajibkan setiap warga untuk melakukan pemilahan sampah di sumbernya, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Dari 12.000 penduduk, hanya sekitar 30% yang secara aktif berpartisipasi dalam program 3R. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 8.400 penduduk yang belum terlibat secara aktif, sehingga banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik dan akhirnya mencemari lingkungan.

Pengawasan terhadap program pengelolaan sampah di TPS 3R Pedalangan juga belum optimal. Kurangnya pengawasan menyebabkan beberapa kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan fasilitas tidak segera teratasi, sehingga menghambat efektivitas program 3R. Terbatasnya anggaran untuk perawatan dan pengembangan fasilitas TPS 3R menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini. Pendanaan yang tersedia hanya mencukupi untuk

operasional dasar tanpa adanya peningkatan fasilitas atau teknologi pengelolaan sampah. Sebagai contoh, anggaran pemasukan tahunan untuk TPS 3R Pedalangan hanya sekitar Rp 150 juta, yang sebagian besar digunakan untuk biaya operasional rutin seperti pengangkutan sampah dan gaji pekerja. Hal ini menghambat upaya peningkatan kapasitas dan efektivitas pengelolaan sampah di kelurahan tersebut.

Melihat beberapa permasalahan tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih dapat memaksimalkan melakukan pekerjaan pengelolaan sampah di TPS 3R sebagai upaya untuk menjaga serta melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul "**Analisis Kesesuaian Program Pengelolaan Sampah Pada TPS 3R Pedalangan Banyumanik Semarang**".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jatibarang yang sudah mencapai status *overloaded*
2. Lemahnya bantuan dari pihak berwenang dalam membantu pengelola kawasan dalam mengatur sampah secara mandiri
3. Perilaku masyarakat yang masih kurang sadar akan pengelolaan sampah yang baik sehingga menimbulkan peningkatan kapasitas sampah
4. Tren peningkatan tumpukan sampah di Kelurahan Pedalangan yang masih terus meningkat



### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan masalah menjadi "Bagaimana kesesuaian program pengelolaan sampah pada TPS 3R Pedalangan Banyumanik Semarang?"

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah "Untuk mengetahui kesesuaian program pengelolaan sampah pada TPS 3R Pedalangan Banyumanik Semarang."

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan juga menambah wawasan dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam bidang kebijakan publik.

#### **b. Kegunaan Praktis**

##### **1. Bagi Penulis**

Dengan adanya penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan dan menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang.

##### **2. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian karya ilmiah ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi yang berguna bagi pembaca dan juga dapat menambah wawasan

mengenai ilmu pengetahuan tentang administrasi publik khususnya pada bidang kebijakan publik

3. Bagi TPS 3R Pedalangan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Hasil penelitian karya ilmiah ini dapat dijadikan sumber rujukan dan informasi untuk dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk dapat lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini juga nantinya diharapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengenai bagaimana cara meningkatkan pengelolaan sampah yang baik guna terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman.

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian mengenai kesesuaian kebijakan dalam Pengelolaan sampah. Adanya analisis penelitian terdahulu yang pernah dilaksanakan peneliti tersebut dapat dipaparkan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal	Metode dan Teori Yang Digunakan	Tujuan	Hasil Temuan Penelitian
1.	Muhammad Ibrahim Sahupala  Kesesuaian Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan	Metode : Teknik studi kasus kualitatif yang dikombinasikan dengan metode analisis deskriptif adalah metodologi penelitian yang digunakan. Metode kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian yang	Menganalisis kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan kesesuaian kebijakan Pengelolaan Sampah. sosialisasi peraturan untuk memungkinkan adanya dialog terbuka dengan masyarakat.

	Hidup Kota Tasikmalaya	<p>lebih menyeluruh dan lebih memahami bagaimana kebijakan disesuaikan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkarakterisasi secara tepat sifat dari berbagai peristiwa kelompok dan individu yang dihasilkan dari temuan studi, serta untuk menggambarkan pengaturan lapangan dan menemukan fakta-fakta dengan interpretasi.</p> <p>Teori : Teori kesesuaian kebijakan Van Metre dan Van Horn, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan disesuaikan bergantung pada sejumlah faktor.</p>	serta faktor-faktor yang mempengaruhinya	Instansi lain dan Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi.
2.	Nur Aini, et al.  The Implementation Of Area Government Policy In Waste Processing	<p>Metode : Jenis penelitian yang digunakan di Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat pemerintah daerah adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif.</p> <p>Teori : Teori Kesesuaian George C. Edward III. Faktor pendukung dan faktor penghambat menurut George C. Edward III</p>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah serta bentuk program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketidakjelasan isi kebijakan yang tidak dipahami oleh masyarakat terkait komunikasi karena tingkat pengetahuan, kewenangannya adalah pengawasan lapangan yang menangani kebersihan kota terkait dengan sumber daya dan juga sarana prasarana, disposisi terkait dengan kognisi dan struktur organisasi terkait dengan koordinasi yang terdapat dalam struktur organisasi. Masih menggunakan sistem manual, yaitu dilakukan dengan cara dumping (penumpukan).
3.	Stevanni Imelda Christianingrum & Titik Djumiarti  Kesesuaian Program Kota Tanpa Kumuh Di	<p>Metode : Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif. Di mana peneliti menjadi instrumen utama. Pengumpulan data dilaksanakandengan teknik</p>	Tujuan dari penerilitian ini adalah untuk menganalisis program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan	Berdasarkan temuan penelitian, KOTAKU telah disesuaikan. Laporan ini memberikan beberapa saran, salah satunya adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program

	Kecamatan Semarang Timur	triangulasi (kombinasi berbagai metode)  Teori : Penelitian ini menggunakan teori kesesuaian Korten.	Semarang Timur serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program ini	KOTAKU, pemerintah perlu lebih mensosialisasikan program ini dan bekerja sama secara langsung dengan masyarakat. Penelitian lebih lanjut harus difokuskan pada perlunya pendekatan sosialisasi dari bawah ke atas yang melibatkan lebih banyak individu dalam proses sosialisasi.
4.	Apfia Suselawati Dewi Yen, Saladin Ghalib, Taufik Arbain  Implementation Of Waste Management Policy In Teweh Tengah Sub-District, Barito Utara Regency	Metode : Metode penelitian yang diterapkan yaitu penelitian kualitatif.  Teori : Teori Kesesuaian Edward III yang dalam penelitian ini membahas faktor apa yang menghambat dan mendukung jalannya kebijakan.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sampah pada Kabupaten Teweh tengah serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesesuaian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Teweh Tengah	Hasil kajian menunjukkan bahwa kesesuaiannya masih jauh dari harapan dan tujuan atau target kebijakan yang ingin dicapai, selain itu masih terdapat hal-hal yang terjadi di lapangan yang menghambat kesesuaian kebijakan ini
5.	Ishfaq Showket Mir, et al.  Implementation Analysis Of Solid Waste Management (SWM) In Ludhiana City Of Punjab	Metode : Untuk tujuan penelitian, metodologi campuran analisis kuantitatif dan kualitatif. Kuesioner Terstruktur dibingkai untuk survei rumah tangga di kota sesuai dengan variabel penelitian. Diskusi dan wawancara diadakan dengan petugas terpilih dari departemen persampahan kota.  Teori : Model Kesesuaian Weimer dan Vining (Tahir, 2014:76),	Menganalisis kebijakan pengelolaan sampah padat Kota Ludhiana.	Pada tahap pelaksanaan pengelolaan sampah, kendala administratif seperti kurangnya teknologi dan peralatan modern, kurangnya lahan untuk pembuangan dan pembuangan serta kurangnya program pengelolaan sampah terpadu (ISWM) menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaan. Berdasarkan analisis, studi ini mengusulkan berbagai rekomendasi kebijakan dalam hal tantangan administratif untuk meningkatkan SWM di kota.

6.	<p>Okoli, et al.</p> <p>Waste management policy implementation in Nigeria: A study of Rivers state waste management agency.</p>	<p>Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pelaksanaan observasi, analisis konten data, dan Studi Literatur.</p> <p>Teori : Penelitian ini menggunakan teori kesesuaian Aminu, et al.</p>	<p>Menganalisis pengelolaan sampah pada negara Nigeria serta faktor apa saja yang mempengaruhi jalannya kebijakan</p>	<p>Studi ini menemukan bahwa ada hubungan antara desain kebijakan dan manajemen yang efisien dari Badan, tetapi mencatat bahwa beberapa tantangan kelembagaan seperti inefisiensi vendor, kesadaran dan pendidikan masyarakat yang buruk, tidak adanya tempat pembuangan sampah antara lain menghambat pencapaian beberapa tujuan. Badan dan merekomendasikan reformasi administrasi yang akan mencakup komersialisasi penuh Badan untuk penciptaan kekayaan, kesadaran publik yang lebih baik, pembentukan tempat pembuangan sampah, antara lain sebagai obat mujarab untuk pengelolaan limbah yang efisien di Negara Bagian.</p>
7.	<p>R. Lalitha &amp; S. Fernando</p> <p>Pengelolaan Sampah Padat Pemerintah Daerah Di Provinsi Bagian Barat Sri Lanka: Analisis Kesesuaian</p>	<p>Metode : Baik metode kualitatif maupun kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Wawancara dan diskusi mendalam dilakukan dengan pejabat terpilih yang bertanggung jawab atas penerapan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan di tingkat kesesuaian. Di antara 48 Pemda di Provinsi Barat, 50% (dua puluh empat) Pemda dipilih berdasarkan metode stratified random sampling untuk analisis kuantitatif.</p> <p>Teori : Penelitian ini didasarkan pada teori kesesuaian Edward III. Pendekatan studi kesesuaian</p>	<p>Menganalisis kebijakan pengelolaan sampah padat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sri Lanka.</p>	<p>Studi ini menemukan bahwa remunerasi dan fasilitas lainnya dari staf, komitmen mereka, motivasi dan dukungan dari pimpinan politik, kontribusi dari masyarakat dan dunia usaha secara signifikan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program SWM. SWM belum berhasil pada tahap kesesuaiannya karena beberapa masalah administrasi seperti tidak cukupnya lahan untuk pembuangan akhir, pengomposan dan daur ulang, kurangnya kendaraan yang diperlukan dan program pengelolaan sampah terpadu, kurangnya instrumen yang diperlukan dan teknologi modern, kerangka peraturan yang buruk, rendahnya produktivitas dan kuantitas</p>

		kebijakan ini dimulai dengan pertanyaan abstrak mengenai apa saja prasyarat untuk keberhasilan kebijakan publik, serta mengidentifikasi hambatan utama yang menghalangi kesuksesan kebijakan publik..		tenaga kerja, kurangnya kesadaran warga dan campur tangan politik yang tidak tepat.
8.	Leonio Maria Da Silva, et al.  Kesesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Dili Timor Leste	Metode : Metode penelitian yang dipakai pada pelaksanaan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Teori : Model Kesesuaian Kebijakan Grindle (1980), keberhasilan kesesuaian kebijakan Pemda dalam pengelolaan sampah dipengaruhi oleh isi kebijakan.	Menganalisis kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Dili, Timor Leste dalam pengelolaan sampah serta faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan pengelolaan sampah tersebut	Temuan dalam penelitian ini adalah masih banyak kekurangan baik dari segi isi kebijakan maupun kesesuaian kebijakan.
9.	Delufa Tiz Jerin, et al.  Gambaran Umum Kemajuan Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dhaka, Bangladesh	Metode : Studi ini mengadopsi pendekatan multi-metode dengan meninjau 24 dokumen kebijakan/strategi; analisis kesenjangan kesesuaian dengan tinjauan pustaka ekstensif dan data yang diperoleh dari pendekatan kualitatif dan lokakarya produksi bersama. Hal ini memungkinkan penelitian ini untuk menangkap skenario multidimensi dan komprehensif pengelolaan sampah di kota Dhaka.  Teori : Model implmentasi Van Meter dan Van Horn (Tahir, 2014) yang merumuskan sebuah abstraksi dan menunjukkan	Menganalisis kebijakan pengelolaan sampah padat pada Kota Dhaka serta faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut	Bangladesh telah mengalami reformasi dalam pengelolaan limbah padat sejak tahun 1983 dengan penerapan Peraturan Perusahaan Kota Dhaka dan pemberlakuan Strategi 3R Nasional pada tahun 2010. Dengan beberapa pengecualian, sistem pengelolaan limbah secara keseluruhan tidak dapat didefinisikan sebagai pengurangan limbah komprehensif yang efektif, daur ulang dan mekanisme pembuangan berdasarkan standar global. Studi menemukan bahwa beberapa rencana aksi telah diperkenalkan namun tidak semuanya memiliki kesesuaian yang tepat seperti mengikuti praktik pemilahan dan daur

		hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan.		ulang sampah dari rumah tangga ke tingkat TPA. Kurangnya pemantauan dan koordinasi di antara badan-badan pelaksana kebijakan yang ada telah muncul sebagai keprihatinan yang signifikan di Bangladesh.
10.	Wilfredo A. Jaucian & Ronie E. Sugarol  Implementation Of The Waste Management Program Tuguegarao City: An Assessment	Metode : Dengan menggunakan desain penelitian survei deskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.  Teori : Penelitian ini menggunakan model kesesuaian Weimer dan Vining (Tahir, 2014:76), mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis program dari kebijakan pengelolaan sampah pada Kota Tuguegarao serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut	Berdasarkan studi yang dilakukan pada rumah tangga yang diwawancarai, elemen yang dapat dikontrol dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah di Barangay Balzain East, Centro 11, Kota Tuguegarao, Cagayan, deskripsi program yang ditafsirkan luas, menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah di barangay tidak baik dan tidak buruk. Hal tersebut masih dapat meningkatkan program untuk mencapai tujuan menjadi Barangay Balzain East, Centro 11 model barangay di kota Tuguegarao, Cagayan.
11	Deybi Debora Palit, et al  Kesesuaian Program Bantuan Dana Dan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan	Metode: Mengikuti gagasan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, strategi analisis data kualitatif digunakan dalam metodologi analisis data penelitian ini.  Teori: Pendekatan proses pembelajaran menghasilkan apa yang disebut oleh David C. Korten sebagai model kecocokan, yang terdiri dari tiga komponen yang harus disertakan dalam model kesesuaian program. Metodologi Korten berpusat pada tiga aspek utama	Menganalisis Kesesuaian Program Bantuan Dana untuk Masyarakat yang terkena efek dari Covid-19 di Desa Kaasar	Penulis menarik kesimpulan bahwa program kebutuhan dasar dan dukungan finansial bagi individu yang terdampak Covid-19 belum terpenuhi berdasarkan pembahasan temuan studi.

		kesesuaian: program, pelaksanaan program, dan audiens yang dituju.		
12	Muhammad Arfi Rayyan  Analisis Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran pada Pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo	Metode: Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive dan snowball.  Teori: Menurut David C. Korten, ada tiga indikator kesesuaian program yang harus sesuai agar sebuah program dapat dilaksanakan dengan baik. Pertama, harus ada kesesuaian antara target audiens program dengan penawaran program; dengan kata lain, persyaratan program dan target audiens harus sesuai.	Menganalisis kesesuaian antara program dan kelompok sasaran	Program dianggap tidak dapat berfungsi dengan baik jika dikesesuaikan tetapi gagal memenuhi permintaan audiens yang dituju.

Sumber: Diolah dari Berbagai Jurnal

Penelitian terdahulu merupakan salah satu dasar acuan bagi penulis yang didalamnya mengandung teori-teori atau temuan-temuan dari hasil penelitian sebelumnya. Hal ini menjadi suatu kebutuhan dalam jalannya penelitian untuk dapat dijadikan data pendukung dalam jalannya penelitian. Persamaan pada penelitian ini terletak pada teori kesesuaian yang akan menjadi salah satu fokus utama penelitian dan juga memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Selain itu, persamaan pada penelitian ini berada pada eksplorasi penelitian yang mengarah kepada Kebijakan Pengelolaan Sampah. Di balik itu, hal yang menjadi pembeda



dalam jalannya penelitian ini dari penelitian terdahulu terdapat pada lokus penelitian dan penggunaan model teori. Area penelitian skripsi ini dilakukan di TPS 3R Pedalangan Banyumanik Kota Semarang.

### **1.6.2 Administrasi Publik**

Administrasi publik mencakup semua aspek proses pemerintahan yang tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi ditujukan untuk kepentingan penduduk serta sejalan dengan tujuan bangsa yang sudah ditentukan pada regulasi. Menurut Chandler dan Plano yang dikutip dalam Keban (2008:4), administrasi publik merupakan prosedur yang rumit di mana sumber daya, staf publik diatur serta disinkronkan dengan cermat untuk membuat, melaksanakan juga mengawasi pilihan-pilihan dalam parameter kebijakan publik.

Keban menjelaskan lebih lanjut bahwa istilah "Administrasi Publik" menggambarkan peran penting pemerintah sebagai agen utama otoritas atau badan pengatur, yang secara aktif terlibat dalam tindakan dan inisiatif regulasi. Tindakan ini dianggap penting atau menguntungkan bagi masyarakat, dengan asumsi bahwa masyarakat bersifat pasif, kurang berdaya, dan oleh karena itu harus tunduk dan menerima peraturan serta arahan pengelola (Yeremias T Keban, 2008).

Selain itu, Felix A. Nigro, yang dikutip dalam Pasolong (2007:27), memberikan definisi luas tentang administrasi publik, yang menggambarkannya sebagai: 1) Upaya kolaboratif di antara kelompok-kelompok dalam lingkup pemerintahan; 2) Meliputi struktur tiga cabang pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan hubungan di antara mereka; 3) Berperan penting dalam pembentukan kebijakan pemerintah, sehingga menjadi bagian integral dari proses politik yang

lebih luas; 4) Membangun hubungan erat dengan berbagai kelompok swasta dan individu untuk memfasilitasi penyediaan layanan kepada publik; 5) Dalam beberapa konteks, menunjukkan perbedaan konsep dibandingkan dengan paradigma administrasi individual.

Pengertian administrasi publik menurut Nigro dan Nigro (dalam Selang, 2016:46), seperti penegakan keputusan oleh pejabat publik yang diakui dan diangkat untuk kebaikan bersama. Waldo (dalam Ismi et al., 2021) mendefinisikan administrasi publik sebagai pengelolaan orang dan lembaga dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan.

Michael M. Harmon & Richard T. Mayer (dalam Selang, 2016:42), yang menunjukkan administrasi publik terutama, tetapi tidak terbatas pada, mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan pemerintah. Administrasi publik berurusan dengan keputusan:

1. Pengaruh terhadap masyarakat;
2. Atas nama rakyat;
3. Gunakan sumber daya bersama.

Berdasarkan beberapa definisi terkait administrasi publik yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli yang di atas, mampu diambil kesatuan mengenai definisi administrasi publik. Administrasi publik merupakan tindakan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur publik dengan tujuan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kepentingan publik sesuai dengan target yang telah diharapkan.

### **1.6.3 Paradigma Administrasi Publik**

Nicholas Henry (1985) menjelaskan sebagai “*five paradigms of public administration*” dengan tujuan menunjukkan keunikan bidang ini sebagai sintesis yang relatif baru. Setiap paradigma dapat dikategorikan berdasarkan "lokus" atau "fokus." Lokus mengacu pada domain di mana disiplin ini berada. Secara tradisional, lokus administrasi publik adalah birokrasi pemerintah, meskipun ini tidak sepenuhnya akurat dan seringkali ambigu. Seiring perkembangan bidang ini, lokusnya telah bergeser ke arah kepentingan publik dan urusan publik. Di sisi lain, fokus mengacu pada tema utama yang dipelajari dalam administrasi publik. Awalnya, salah satu fokusnya adalah "prinsip-prinsip administrasi" tertentu, tetapi fokus ini telah berubah seiring dengan evolusi paradigma. Saat ini, fokusnya telah berkembang mencakup teori organisasi dan ilmu manajemen. Lima paradigma administrasi publik tersebut meliputi:

#### **1) Dikotomi Politik dan Administrasi (1990-1926)**

Paradigma pertama menekankan pada di mana seharusnya administrasi publik berada dan disebut sebagai kesenjangan politik-administrasi. Birokrasi pemerintah seharusnya menjadi fondasi administrasi publik, menurut pendapat Goodnow dan rekan-rekannya di bidang ini. Bidang ini dibatasi pada masalah anggaran dan organisasi di lembaga-lembaga pemerintah; politik dan kebijakan dianggap sebagai ruang lingkup ilmu politik. Pembagian antara ilmu politik dan ilmu administrasi merupakan isu utama yang muncul bagi para akademisi dan praktisi pada masa awal

validasi konseptual lokus ini, yang difokuskan pada upaya untuk mendefinisikan bidang ini.

## **2) Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)**

Selama periode ini, lokus administrasi publik sebagian besar diabaikan, sementara fokus beralih ke "prinsip-prinsip" manajerial yang diyakini dengan secara universal di berbagai organisasi dan konteks budaya. Pada tahun 1940-an, salah satu perdebatan utama dalam administrasi publik adalah argumen bahwa politik dan administrasi tidak pernah bisa sepenuhnya dipisahkan. Poin perdebatan lainnya merupakan ketidakkonsistenan logis dari prinsip-prinsip administrasi. Pada pertengahan abad ke-20, konsep dasar tentang dikotomi politik-administrasi dan prinsip-prinsip administrasi digulingkan dan ditinggalkan oleh para pemikir inovatif di bidang ini.

Perubahan ini meninggalkan administrasi publik dengan identitas yang ambigu dan tantangan epistemologis yang berbeda. Beberapa cendekiawan percaya bahwa identitas yang pasti belum dapat ditentukan. Hubungan konseptual antara Administrasi Publik dan Ilmu Politik terletak pada proses pembuatan kebijakan publik. Administrasi Publik berfokus pada mekanisme internal dari proses ini, seperti perumusan kebijakan dalam birokrasi publik dan hubungannya dengan dinamika politik. Sebaliknya, Ilmu Politik memeriksa masukan dan keluaran dari proses ini, melihat bagaimana tekanan politik mengarah pada perubahan politik dan sosial.

### **3) Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)**

Definisi fase ketiga ini terutama bertujuan untuk memulihkan hubungan antara ilmu politik dan administrasi publik. Namun, salah satu hasil dari upaya ini adalah "mendefinisikan" bidang ini sebagai spesialisasi yang sangat signifikan, setidaknya dalam hal fokus analisis. Oleh karena itu, esai-esai mengenai administrasi publik pada tahun 1950-an sering menyebut profesi ini sebagai profesi yang berada di bawah tekanan, topik yang menarik, atau bahkan sebagai cabang dari ilmu politik.

Dalam fase ini, administrasi publik sekali lagi menjadi bagian yang terkait erat dengan ilmu politik. Penerapan prinsip-prinsip administrasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, sehingga jauh dari "bebas nilai." Menarik untuk dicatat bahwa dalam laporan American Political Science Association Committee on Political Science as a Discipline tahun 1962, administrasi publik tidak terdaftar sebagai salah satu cabang ilmu politik. Hal ini menggambarkan bagaimana bidang ilmu politik dan administrasi publik berubah selama periode ini, begitu pula dengan dinamikanya.

### **4) Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)**

Selama periode ini, Administrasi Publik tetap mengandalkan paradigma ilmu administrasi, seiring dengan kemajuan dalam pemahaman psikologi sosial dan analisis sistem. Ilmu administrasi menawarkan fokus tetapi kurang spesifik dalam aplikasinya. Ini menyediakan teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi, namun tanpa konteks yang jelas

untuk penerapannya. Jika ilmu administrasi menjadi satu-satunya fokus administrasi publik, apakah akan cukup untuk menangani persoalan di bidang ini?

Ilmu administrasi berpendapat bahwa setiap organisasi dan gaya manajemen memiliki kualitas yang unik dan bukannya mendukung prinsip-prinsip umum. Jika paradigma ini digunakan untuk menggambarkan ilmu administrasi, administrasi publik hanya dapat dianggap sebagai subbidang dalam disiplin ilmu, mungkin mengambil tempat di belakang administrasi bisnis. Tanpa fokus pada kepentingan publik, ilmu administrasi bisa disalahgunakan, merusak nilai-nilai demokrasi. Konsep menentukan dan menerapkan kepentingan publik menentukan esensi administrasi publik. Ini adalah bidang yang mendapat perhatian terbatas jika hanya dilihat melalui lensa ilmu administrasi, mengabaikan aspek ilmu politiknya.

##### **5) Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-Sekarang)**

Bidang administrasi publik mengalami kesulitan dalam mendefinisikan fokus yang jelas atau apa yang merupakan urusan publik dan kebijakan publik. Kurangnya definisi ini seharusnya mencakup masalah yang relevan bagi administrator publik. Meskipun pilihan ini mungkin tampak sewenang-wenang, administrator publik memiliki kesamaan yang memerlukan konsep interdisipliner di universitas, dengan fokus pada kehidupan perkotaan, hubungan antar-organisasi, dan penghubungan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang dikenal sebagai urusan publik.

Dalam konteks ini, administrasi publik berfokus pada administrasi pembangunan. Perbedaan tradisional dan kaku antara ranah publik dan privat dalam bidang ini memudar dengan definisi baru dan fleksibel dari administrasi publik. Selain itu, ilmu kebijakan, ekonomi politik, prosedur pembuatan kebijakan publik, analisis kebijakan, dan pengukuran hasil kebijakan merupakan bidang-bidang yang semakin banyak dilibatkan oleh para administrator publik. Hal ini menunjukkan perluasan fokus administrasi publik.

#### **1.6.4 Kebijakan Publik**

Plato (dalam Yeremias T Keban, 2008) administrasi publik merupakan tahap di mana sumber daya serta aparatur dapat diatur dan dikoordinasikan dalam membuat, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi publik bertujuan untuk melaksanakan/mengkesesuaikan kebijakan publik yang dilakukan oleh pegawai negeri. Menurut Keban (dalam Keban, 2014:4), mengartikan administrasi publik dalam beberapa variasi, salah satunya adalah administrasi publik. Administrasi publik bermaksud bagaimana pemerintah berfungsi sebagai otoritas tunggal atau sebagai regulator. Mereka selalu aktif melakukan atau mengorganisir tindakan-tindakan yang dianggap penting atau bermanfaat bagi masyarakat, karena banyak yang dianggap pasif, tidak mampu dan tunduk pada muatan pengawasannya sendiri. Peranannya sebagai agen tunggal/*regulatory agency* dari pemerintah mengharuskan peraturan/kebijakan publik digunakan untuk mengatur keberadaan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertanyaan

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan bagian dari administrasi publik.

Kebijakan publik adalah salah satu komponen krusial dalam administrasi publik. Dalam perannya yang sangat penting, kebijakan publik dapat diibaratkan seperti otak manusia yang mengatur seluruh fungsi tubuh. Ini berarti kebijakan publik memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan bernegara, karena semua aktivitas negara diatur melalui kebijakan publik. Menurut Dye (1987:18), kebijakan publik dapat didefinisikan secara singkat sebagai "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Dye mengemukakan definisi ini untuk menunjukkan bahwa segala tindakan atau bahkan ketidakaktifan pemerintah merupakan bentuk dari kebijakan publik.

Pemahaman tentang kebijakan publik menurut Dye ditandai oleh dua hal utama. Pertama, kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh badan pemerintah, bukan oleh entitas lainnya. Ini menegaskan bahwa kebijakan publik memiliki otoritas dan legitimasi yang berasal dari pemerintah. Kedua, kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mencakup pilihan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa tindakan aktif tetapi juga bisa berupa keputusan untuk tidak mengambil tindakan tertentu.

Dalam konteks saat ini, kebijakan publik juga mencakup respon terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan pandemi. Menurut sebuah studi oleh John et al. (2021), kebijakan publik yang responsif dan adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi krisis yang tidak terduga. John dan rekan-rekannya menekankan



bahwa “kebijakan publik yang berhasil adalah kebijakan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat” (solihin abdul wahab, 2005)Ini menambah lapisan kompleksitas baru pada pembuatan kebijakan, karena pemerintah harus lebih proaktif dan reaktif terhadap situasi yang dinamis.

Dengan demikian, kebijakan publik memegang peran sentral dalam administrasi publik. Melalui kebijakan publik, pemerintah dapat mengarahkan, mengontrol, dan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di negara tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik dan proses pembuatannya menjadi sangat penting bagi para praktisi dan akademisi di bidang administrasi publik. Kebijakan publik bukan hanya sekedar keputusan pemerintah, tetapi merupakan instrumen utama dalam mencapai tujuan-tujuan negara dan melayani kepentingan masyarakat luas.

Selain Dye, James E. Anderson menegaskan bahwa kebijakan di suatu bidang adalah perilaku dari banyak aktor, termasuk otoritas, organisasi, dan lembaga-lembaga tertentu. Menurutnya, membahas kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari kepentingan berbagai konstituen, baik yang ada di dalam ataupun di luar pemerintahan (Winarno, 2014)

Menurut Laswell, ilmu kebijakan publik mempunyai tiga komponen utama, yaitu sebagai berikut: 1) metodologi penelitian yang berkaitan dengan proses kebijakan; 2) hasil studi kebijakan; dan 3) penemuan-penemuan penelitian yang memiliki potensi terbesar untuk menjawab tuntutan intelijen kontemporer (Laswell, 1951 dalam Parson, 2006).

Pada dasarnya, kebijakan publik bertujuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat atau dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh lembaga berwenang dalam pemerintahan. Secara umum, kebijakan publik mencakup peraturan resmi yang tertulis dalam bentuk undang-undang, serta aturan tidak tertulis yang disepakati bersama, yang sering disebut sebagai konvensi.

Dalam pengertian substantif, kebijakan publik mengacu pada setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat atau meminimalkan masalah baru. Kepercayaan politik, menurut Hetherington, adalah keyakinan yang dimiliki oleh warga negara terhadap pemerintah mereka.

Budaya dan sistem politik merupakan dua faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Listhaug & Jakobsen (2017) memberikan contoh bagaimana kepercayaan politik menurun ketika ketimpangan politik meningkat. Kinerja politik adalah faktor lainnya. Jika pemerintah berhasil mengkesesuaian program dan layanan publik yang diinginkan masyarakat, kepercayaan politik akan meningkat. Karena ada hubungan timbal balik yang kuat antara persepsi dan kepercayaan terhadap pemerintah, tindakan yang diambil oleh pemerintah, seperti korupsi, memperburuk keadaan ketidakpercayaan terhadap politik dan institusi (Morris & Klesener, 2019).

Menurut Hoogerwerf (dalam Ali, 2017:8), kebijakan dipahami sebagai pernyataan kehendak pemerintah berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya. Pemerintah adalah kekuasaan, dan tanpa kekuasaan tidak ada pemerintahan.

Menurut Dye (dalam Ali, 2017:9), politik adalah hasil dari pemilihan beberapa alternatif untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Pennen (dalam Muhammad, 2019:71) kebijakan publik merupakan suatu tahapan berupa pemilihan dalam menjalankan/tidak menjalankan sesuatu guna mencapai kepentingan umum sebagai tujuan negara dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, pendapat individu atau kelompok orang. di dalam atau di luar pemerintahan.

Berdasarkan beberapa definisi terkait kebijakan publik yang sudah dipaparkan oleh beberapa ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan definisi dari kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu tindakan yang menjadi suatu pilihan bagi pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan dalam mencapai tujuan negara serta kepentingan publik.

### 1.6.5 Proses Kebijakan

Pilihan seorang pejabat atau lembaga untuk menerima, mengubah, atau menolak opsi kebijakan tertentu disebut sebagai keputusan kebijakan (Winarno, 2014). Mengesahkan undang-undang atau mengeluarkan arahan presiden adalah contoh tindakan kebijakan yang baik. Langkah-langkah yang terlibat dalam membuat kebijakan menurut Thomas R. Dye (dalam Nugroho, 2009) yaitu:



**Gambar 1. 3 Proses Kebijakan**

Sumber: Dokumentasi Pengelola

- 1) Tahap Pertama: Untuk membangun masalah publik secara memadai, masalah-masalah tersebut harus diidentifikasi dan dideskripsikan secara tepat. Pada dasarnya, kebijakan publik dibuat untuk mengatasi masalah sosial. Rushefsky menjelaskan bahwa sering kali, mencari tahu masalah itu sendiri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
- 2) Tahap Kedua: Beberapa persyaratan tertentu, seperti dampak yang cukup besar dari isu tersebut, harus dipenuhi agar isu tersebut dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Setelah itu, badan legislatif akan memperdebatkan masalah tersebut berdasarkan urgensinya.
- 3) Tahap Ketiga: Memilih opsi kebijakan yang berbeda untuk mengatasi masalah. Saat ini, para pembuat kebijakan dihadapkan pada sejumlah opsi kebijakan yang akan digunakan dalam menangani masalah tersebut.
- 4) Tahap Keempat: Proses pengesahan kebijakan yang dipilih agar memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan merupakan bagian dari langkah penetapan kebijakan. Keputusan ini dapat dibuat melalui undang-undang, hukum kasus, perintah eksekutif, perintah menteri, dan sebagainya.

#### **1.6.6 Kesesuaian**

Kesesuaian atau alignment dalam konteks organisasi merupakan konsep yang mengacu pada penyesuaian antara berbagai elemen dalam organisasi agar selaras dan mendukung tujuan bersama. Kesesuaian yang baik antara strategi, struktur, budaya, dan program organisasi dengan kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing organisasi.

Dalam literatur manajemen, kesesuaian dianggap sebagai faktor kunci untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal.

Para ahli telah memberikan berbagai definisi mengenai kesesuaian dalam konteks program:

1. Nadler dan Tushman (1980): Kesesuaian adalah penyesuaian antara berbagai komponen dalam organisasi untuk mencapai efektivitas keseluruhan. Mereka menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara strategi, struktur, proses, dan orang-orang dalam organisasi.
2. Henderson dan Venkatraman (1993): Kesesuaian adalah proses penyesuaian antara strategi bisnis dan strategi teknologi informasi. Mereka mengembangkan model kesesuaian strategis yang menunjukkan bagaimana organisasi dapat mengoptimalkan kinerja dengan menyalurkan strategi bisnis dan teknologi.
3. Venkatraman (1989): Kesesuaian adalah tingkat penyesuaian antara strategi bisnis dengan lingkungan eksternal. Kesesuaian yang baik memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan lingkungan dengan lebih efektif dan efisien.

Selain itu bentuk-bentuk dari kesesuaian terdiri sebagai berikut:

1. Kesesuaian strategis adalah penyesuaian antara strategi organisasi dengan lingkungan eksternal. Chandler (1962) menyatakan bahwa "*structure follows strategy*," yang menegaskan pentingnya penyesuaian struktur organisasi dengan strategi yang diadopsi. Kesesuaian strategis memungkinkan organisasi untuk merespons dinamika pasar dan perubahan

teknologi dengan lebih efektif. Hrebiniak dan Joyce (1985) juga menekankan bahwa kesesuaian strategis yang baik dapat meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan jangka panjang.

2. Kesesuaian operasional mengacu pada penyesuaian antara proses bisnis internal dan tujuan strategis organisasi. Menurut Porter (1996), kesesuaian operasional adalah kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Proses bisnis yang diselaraskan dengan tujuan strategis memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi inefisiensi, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Dengan kata lain, kesesuaian operasional memastikan bahwa setiap kegiatan operasional mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara keseluruhan.
3. Kesesuaian budaya adalah penyesuaian antara budaya organisasi dan strategi yang diterapkan. Schein (2010) berpendapat bahwa budaya organisasi yang kuat dan selaras dengan strategi dapat meningkatkan komitmen karyawan dan kinerja organisasi. Budaya yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan strategis organisasi menciptakan lingkungan kerja yang positif, memotivasi karyawan, dan meningkatkan loyalitas serta retensi tenaga kerja. Oleh karena itu, kesesuaian budaya tidak hanya mendukung pencapaian tujuan strategis tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan produktivitas karyawan.

4. Kesesuaian program mengacu pada penyesuaian antara program-program yang dijalankan oleh organisasi dengan tujuan strategis dan operasionalnya. Program-program ini bisa berupa inisiatif, proyek, atau kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Pemilihan dan pelaksanaan program yang sesuai adalah penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Menurut Kaplan dan Norton (2001), program yang dirancang dengan baik dan selaras dengan strategi organisasi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran kinerja dan meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan.

Kesesuaian adalah konsep multi-dimensi yang mencakup kesesuaian strategis, operasional, budaya, dan program. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan berkontribusi secara sinergis terhadap keberhasilan organisasi. Studi empiris menunjukkan bahwa organisasi yang mampu mencapai kesesuaian dalam keempat dimensi ini cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan daya saing yang lebih tinggi (Venkatraman & Camillus, 1984). Oleh karena itu, para manajer dan pemimpin organisasi perlu terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi, proses, budaya, dan program organisasi untuk mencapai kesesuaian yang optimal dan mendukung keberhasilan jangka panjang.

### **1.6.7 Kesesuaian Program**

Kesesuaian program merupakan konsep yang mengacu pada penyesuaian dan penyeselarasan program-program organisasi dengan tujuan strategis dan operasional. Program yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik dapat membantu organisasi mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi, serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Literatur manajemen strategis dan operasional telah banyak membahas pentingnya kesesuaian program dalam konteks keberhasilan organisasi.

Kesesuaian program adalah proses penyeselarasan antara inisiatif atau proyek yang dijalankan organisasi dengan tujuan strategisnya. Kaplan dan Norton (2001) menyatakan bahwa program yang diselaraskan dengan strategi memungkinkan organisasi untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam tindakan nyata yang dapat diukur. Program yang sesuai harus menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan pemegang saham.

Dalam pandangan Ansoff (1987), kesesuaian program merupakan bagian integral dari manajemen strategi. Program harus disesuaikan dengan dinamika lingkungan eksternal dan internal agar dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kesesuaian program tidak hanya mendukung pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga memperkuat posisi kompetitif organisasi dalam jangka panjang.

Kesesuaian program memiliki dampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Venkatraman dan Camillus (1984) menyatakan bahwa kesesuaian yang



tinggi antara program dan strategi organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing. Program yang sesuai memastikan bahwa semua sumber daya organisasi digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan strategis.

Selain itu, kesesuaian program juga dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan. Schein (2010) menekankan bahwa program yang selaras dengan budaya organisasi dan nilai-nilai karyawan dapat meningkatkan komitmen dan kinerja individu. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

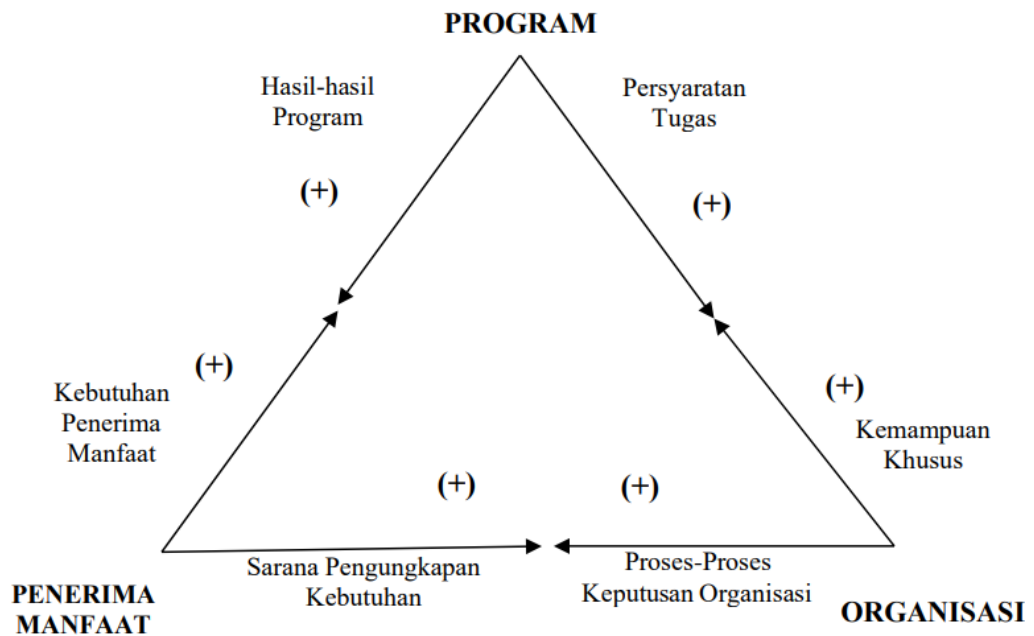
Kesesuaian program adalah elemen krusial dalam manajemen strategis dan operasional. Melalui perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang baik, kesesuaian program dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing organisasi. Studi empiris menunjukkan bahwa organisasi yang berhasil menyelaraskan program-program mereka dengan tujuan strategis cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, manajer dan pemimpin organisasi harus terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan program-program mereka untuk mencapai kesesuaian yang optimal dan mendukung keberhasilan jangka panjang.

#### **1.6.8 Model Kesesuaian Program David C. Korten**

Ada beberapa model pendekatan yang dapat digunakan sebagai panduan atau acuan dalam melaksanakan kebijakan publik. Adopsi publik terhadap suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh bentuk-bentuk kesesuaian kebijakan tersebut.

Adapun model kesesuaian David C. Korten yang akan dijadikan salah satu teori utama dalam jalannya penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Model kesesuaian program menurut David C. Korten harus mencakup tiga unsur yang disebutnya model kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. Korten menekankan dalam model ini tiga faktor yang relevan, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.



**Gambar 1. 4 Model Kesesuaian Kesesuaian David C. Korten**

Sumber: Olahan Peneliti

Penjelasan terkait bagian-bagian dalam gambar model kesesuaian David C. Korten (Akib & Tarigan, 2008a) adalah:

**1) Program**

Program adalah deklarasi yang merangkum banyak tujuan atau harapan yang saling berhubungan dan saling berkaitan dalam mencapai satu tujuan.

Joan L. Herman (Farida, 2015) menonjolkan pengertian Segala sesuatu yang dilaksanakan dengan harapan untuk memberikan hasil atau dampak disebut program. Lebih lengkap, Hasibuan (2006:72) juga menunjukkan bahwa Segala sesuatu yang dilaksanakan dengan harapan untuk memberikan hasil atau dampak disebut program.

Pengertian program adalah usaha atau kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu, yang mencakup pengelolaan sumber daya publik untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga negara.. instansi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. dan menerima alokasi anggaran atau kegiatan kemasyarakatan yang dikoordinir oleh organisasi kemasyarakatan. Sebuah program biasanya terdiri dari semua tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan atau berurutan, yang saling melengkapi dan saling bergantung, dan yang merupakan bagian dari unit atau tujuan administratif yang sama.

## **2) Organisasi Pelaksana**

Secara sederhana, organisasi dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang menjadi wadah atau sarana untuk mencapai tujuan atau sasaran yang berbeda-beda. Organisasi memiliki banyak komponen akar rumput, antara lain banyak orang, hubungan industrial, profesional tenaga kerja dan persepsi yang wajar dari para anggotanya sesuai tanggung jawab masing-masing. kemampuan dan keahlian.

Menurut Robbins (dalam Budihardjo, 2014:17), mengemukakan bahwa organisasi merupakan kumpulan elemen-elemen sosial yang bekerja sama dalam periode waktu tertentu dan berkesinambungan serta secara sengaja dikoordinasikan dalam batas-batas yang ditentukan untuk mencapai tujuan bersama

Organisasi dianggap sebagai sebuah proses dan juga sebagai lokasi di mana orang-orang terlibat, yang mendorong lebih banyak kontak di antara para anggota organisasi. Pengembangan organisasi terkait dan kualitas sumber daya manusia yang berinteraksi satu sama lain menentukan keberhasilan organisasi.

### **3) Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran merupakan istilah yang diaplikasikan dengan merujuk pada kelompok orang yang menjadi fokus atau target dari suatu program, kebijakan, atau kegiatan tertentu. Kelompok sasaran dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan dari program atau kegiatan tersebut.

Pemilihan kelompok sasaran dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas yang diidentifikasi oleh pembuat kebijakan atau pengelola program. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya dan upaya yang ada diarahkan secara efektif kepada mereka yang membutuhkannya dengan sebaik-baiknya.

Penting untuk mencermati dan memperhatikan kelompok sasaran secara khusus karena mereka sering kali menghadapi tantangan atau kesulitan khusus yang perlu diperhatikan. Dengan memahami karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, program dan kegiatan dapat

dirancang agar lebih relevan, efektif, dan berdampak positif bagi kelompok sasaran.

Korten meyakini bahwa keberhasilan pelaksanaan sebuah program bergantung pada keselarasan dari tiga komponennya. Pertama, harus ada keselarasan antara program dengan kebutuhan dari kelompok sasarannya. Kedua, harus ada keselarasan antara program dan badan pelaksana, memastikan bahwa tugas-tugas yang diminta oleh program sesuai dengan kapasitas badan pelaksana. Ketiga, harus ada keterpaduan antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat tercapai melalui kapasitas yang dimiliki oleh kelompok sasaran.

Berlandaskan model yang dibuat oleh Korten, terlihat bahwa tanpa adanya keselarasan di antara tiga faktor kesesuaian kebijakan, kinerja program mungkin tidak mencapai harapan yang diinginkan. Jika hasil program tidak memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, maka manfaatnya menjadi terbatas. Demikian pula, apabila organisasi yang menjalankan program tidak mememponyai memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diminta oleh program, maka hasil program dapat terhambat.

Model kesesuaian penegakan program yang diperkenalkan oleh Korten tidak hanya memperluas kerangka kerja penegakan kebijakan yang ada tetapi juga memberikan wawasan yang unik. Hal ini mampudilihat dari istilah yang tepat yang digunakan. Akibatnya, berbagai bentuk kesesuaian dalam Model Kesesuaian Korten dapat diuraikan sebagai berikut:

**1) Kesesuaian Antara Program Dengan Pemanfaat Atau Kelompok Sasaran**

Kesesuaian antara apa yang dihasilkan (*output*) oleh program dengan apa yang menjadi kebutuhan kelompok sasaran (pemanfaat).

**2) Kesesuaian Antara Program Dengan Organisasi Pelaksana**

Kesesuaian antara tugas yang terkandung dalam program dengan kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankan tanggungjawabnya.

**3) Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana**

Kesesuaian antara keterlibatan kelompok sasaran dalam administrasi program dan persyaratan yang ditetapkan atau ditentukan oleh organisasi pelaksana untuk memperoleh keluaran program.

**1.6.9 Pengelolaan Sampah**

Sampah merujuk pada barang-barang yang tidak lagi diinginkan oleh pemiliknya dan memiliki sifat padat. Jenis sampah bisa bervariasi, ada yang cenderung cepat membusuk dan ada pula yang tidak mudah membusuk (Rosyadi et al., 2023). Sampah yang cenderung membusuk dengan cepat biasanya terdiri dari bahan-bahan organik seperti sisa sayuran, daging, dedaunan, dan lain sebagainya. Sementara itu, sampah yang tidak mudah membusuk umumnya berupa plastik, kertas, karet, logam, abu hasil pembakaran, dan sejenisnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam

yang berbentuk padat. Sampah spesifik merujuk pada jenis sampah yang membutuhkan penanganan khusus karena sifatnya, konsentrasinya, dan/atau volumenya. Menurut pandangan Slamet (2019), sampah merupakan sisa-sisa aktivitas manusia atau proses alamiah yang berbentuk padat atau semi-padat, terdiri dari bahan organik dan anorganik yang mungkin terurai secara alamiah atau tidak terurai secara alamiah, dan dibuang ke lingkungan karena dianggap sudah tidak dapat digunakan lagi.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampah merujuk pada bagian dari suatu barang atau material yang tidak dimanfaatkan, diinginkan, atau harus dibuang, biasanya berasal dari aktivitas manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi tidak termasuk limbah biologis (karena limbah manusia tidak termasuk di dalamnya) dan biasanya berwujud padat (karena air bekas tidak dianggap sebagai sampah).

Penanggulangan sampah menurut (Siroj, 47:220) dalam bukunya Fiqih Penanggulangan Sampah Plastik, terdiri beberapa fase sebagai berikut:

### **1. Perubahan Paradigma**

Perubahan paradigma yaitu perubahan sosial yang terberhubunganait pola pikir atau *mindset* masyarakat. Secara teoritis, perubahan sosial juga menunjukkan modifikasi pada struktur sosial yang membentuk masyarakat, seperti lembaga sosial dan adat istiadat. Misalnya, pergeseran dari pola pikir yang sering kali disediakan menjadi pola pikir yang mengambil inisiatif. Contoh lainnya adalah seseorang yang awalnya senang membuang sampah sembarangan, kemudian belajar untuk membuang sampah pada tempatnya.

Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa membalikkan tangan tidak dapat mengubah cara berpikir masyarakat. Hal ini membutuhkan tekad, kesabaran, dedikasi yang kuat, dan waktu untuk menyelesaikan prosedur ini.

Pendekatan yang tepat harus digunakan bersama dengan kegiatan spesifik yang memenuhi kebutuhan masyarakat atau subjek sasaran program untuk mengubah paradigma masyarakat. Oleh karena itu, perubahan paradigma mampu dilihat sebagai langkah pertama untuk mengubah perilaku masyarakat dan komunitas.

## **2. Meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat**

Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam menangani bahaya sampah adalah langkah penting berikutnya setelah meningkatkan kesadaran dan membawa perubahan paradigma dalam sikap dan perilaku. Tidaklah cukup bagi negara dan pemerintah untuk mengatasi tantangan sampah sendirian.

Secara teknis, bentuk kegiatan untuk memberikan edukasi dan mainstriming persampahan yaitu kegiatan *Training of Trainer* (TOT) dan simulasi tata kelola bank sampah. Melalui kedua inisiatif ini, setidaknya akan dihasilkan kader-kader yang berpengalaman dalam pengelolaan bank sampah yang benar dan memiliki pengetahuan serta daya cipta untuk mengatasi berbagai masalah terkait sampah.

## **3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat**

Kampanye gerakan "Nusantara Bebas Sampah" diperlukan sebagai respon atas ketidakpedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan yang



berakibat pada meningkatnya jumlah sampah yang menurunkan daya dukung lingkungan. Masyarakat diedukasi dan diarusutamakan baik di tingkat nasional maupun lokal untuk peduli terhadap masalah sampah yang semakin membahayakan kehidupan manusia di bumi. Proses sosialisasi dan tindak lanjut ini terus dilakukan.

Pengertian pengelolaan sampah menurut Kartikawan (2019) adalah “Semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, Pengelolaan dan pembuangan akhir”.

Pengelolaan sampah secara keseluruhan menghadapi sejumlah masalah yang rumit. Masalah-masalah ini termasuk tingginya tingkat penciptaan sampah, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, dan masalah dengan prosedur pembuangan akhir (*final disposal*) yang pasti akan menyebabkan masalah lebih lanjut.

Menerapkan 3R untuk mengelola sampah adalah salah satu cara untuk mencoba menemukan solusi untuk masalah sampah menurut Widyaningsih (2019), yaitu:

1. *Reuse* (penggunaan kembali) yaitu memakai kembali sampah yang masih bisa dimanfaatkan, seperti botol kosong.
2. *Reduce* (pengurangan) yaitu melakukan usaha pengurangan timbulan sampah serta mengurangi limbah-limbah yang menumpuk sebelumnya.

3. *Recycle* (daur ulang) yaitu mengolah beberapa sampah untuk menghasilkan produk yang lebih bermanfaat (misalnya, mendaur ulang sampah organik menjadi kompos atau sampah anorganik menjadi kerajinan tangan yang berbeda).

Slamet (2019) memaparkan beberapa kendala dalam pengelolaan sampah di Indonesia merupakan isu yang cukup kompleks karena:

1. Perkembangan teknologi yang pesat melampaui kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami masalah persampahan.
2. Peningkatan standar hidup masyarakat tidak diimbangi dengan pengetahuan yang sesuai tentang pengelolaan sampah.
3. Praktik pengelolaan sampah yang tidak efektif mengakibatkan peningkatan populasi lalat dan tikus, gangguan estetika, dan kontaminasi udara, tanah, dan air.
4. Kesulitan dalam mencari lahan yang sesuai sebagai tempat pembuangan akhir sampah, baik karena kondisi tanah yang tidak cocok maupun kompleksitas regulasi penggunaan lahan.
5. Meningkatnya kekhawatiran masyarakat akan daerah mereka digunakan sebagai tempat pembuangan sampah.
6. Kurangnya pengawasan dan penegakan peraturan.
7. Tantangan dalam menarik perhatian masyarakat terhadap praktik pembuangan sampah yang benar dan menjaga kebersihan.
8. Pendanaan yang kurang memadai, mengingat bahwa sebagian besar pengelolaan sampah masih ditangani oleh lembaga pemerintah.

### 1.6.10 Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R)

Pengelolaan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) merupakan pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dengan cara mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*) bahan yang dianggap sebagai limbah. Pendekatan 3R ini telah menjadi landasan utama dalam manajemen sampah modern yang diadopsi oleh banyak negara di dunia untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan.

#### 1. *Reduce* (Mengurangi)

*Reduce* adalah langkah pertama dalam hierarki 3R yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Prinsip *reduce* menekankan pentingnya perubahan perilaku konsumsi dan produksi untuk mengurangi volume sampah dari sumbernya. Menurut The World Bank (2018), strategi ini dapat dilakukan melalui pengurangan penggunaan produk sekali pakai, peningkatan efisiensi produksi, dan pemilihan produk dengan kemasan yang minimal. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, tekanan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA) dan sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan dapat berkurang. Lebih lanjut, Godfrey et al. (2019) menyatakan bahwa pengurangan sampah di sumbernya merupakan langkah paling efektif dalam mengelola sampah karena mencegah terbentuknya limbah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut.

## 2. *Reuse* (Menggunakan Kembali)

*Reuse* adalah langkah kedua yang bertujuan untuk memperpanjang umur produk dengan cara menggunakannya kembali sebelum akhirnya menjadi sampah. Prinsip *reuse* mendorong masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan barang-barang yang masih memiliki nilai guna, baik dalam bentuk asli maupun setelah melalui perbaikan. Menurut The Environmental Protection Agency (EPA, 2019), penggunaan kembali barang dapat mengurangi kebutuhan akan produk baru, yang pada gilirannya mengurangi jumlah sampah dan konsumsi sumber daya alam. Contoh praktik *reuse* termasuk menggunakan kembali botol dan wadah, mendonasikan pakaian bekas, dan memanfaatkan kembali peralatan elektronik setelah diperbaiki. Levine dan Tellez (2015) juga menekankan bahwa penggunaan kembali barang dapat memberikan manfaat ekonomi dengan mengurangi biaya pembelian barang baru dan meminimalkan kebutuhan akan sumber daya mentah.

## 3. *Recycle* (Mendaur Ulang)

*Recycle* adalah langkah terakhir dalam pendekatan 3R yang melibatkan pengolahan sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Proses daur ulang memerlukan pemilahan dan pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, seperti plastik, kertas, logam, dan kaca, yang kemudian diolah kembali menjadi bahan baku untuk produk baru. Menurut Jambeck et al. (2015), daur ulang dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, menghemat sumber daya alam, dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses produksi bahan baru. Namun, keberhasilan program daur ulang sangat

bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah serta infrastruktur pendukung yang memadai. Dalam hal ini, Agamuthu dan Fauziah (2011) menekankan bahwa edukasi masyarakat dan pembangunan fasilitas daur ulang yang efisien adalah kunci untuk meningkatkan tingkat daur ulang.

Pendekatan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan sampah. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, menggunakan kembali barang-barang yang masih memiliki nilai guna, dan mendaur ulang bahan-bahan yang dapat diolah kembali, pendekatan 3R dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan menghemat sumber daya alam. Lebih lanjut, konsep 3R tidak hanya membutuhkan perubahan perilaku di tingkat individu dan komunitas, tetapi juga dukungan kebijakan yang kuat dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, 3R tidak hanya sekedar strategi pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya global untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

Definisi Pengelolaan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) berdasarkan penelitian ini adalah pendekatan strategis yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan sampah dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan (*reduce*), memaksimalkan penggunaan kembali barang-barang yang masih memiliki nilai guna (*reuse*), dan mendaur ulang bahan-bahan yang dapat diolah kembali menjadi produk baru yang bermanfaat (*recycle*).

### **1.6.11 Kriteria Kesesuaian Program Pengelolaan Sampah TPS 3R**

Kesesuaian program pengelolaan sampah adalah proses penyesuaian antara inisiatif atau proyek pengelolaan sampah dengan tujuan strategis, kebijakan lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Program yang sesuai dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, mengurangi dampak lingkungan negatif, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Untuk mencapai kesesuaian ini, beberapa kriteria penting harus dipenuhi. Berikut adalah kriteria kesesuaian program pengelolaan sampah yang dirangkum dari berbagai literatur dan dihubungkan dengan model kesesuaian program dari David C. Korten.

#### **A. Kriteria Kesesuaian Program Pengelolaan Sampah**

##### **1. Kesesuaian dengan Kebijakan dan Regulasi**

Program pengelolaan sampah harus sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan mengenai pengelolaan limbah, standar lingkungan, dan kebijakan pengurangan sampah. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan adalah aspek kritis dalam keberlanjutan program pengelolaan sampah (Porter, 1996).

##### **2. Dukungan Infrastruktur yang Memadai**

Program pengelolaan sampah harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Infrastruktur yang baik memastikan efisiensi operasional dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Infrastruktur yang

memadai merupakan tulang punggung dalam pengelolaan sampah yang efektif (Kaplan & Norton, 2001).

### 3. Keterlibatan dan Edukasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam kesuksesan program pengelolaan sampah. Program harus mencakup inisiatif edukasi dan kampanye kesadaran untuk mendorong perilaku ramah lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan sampah meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan jangka panjang (Schein, 2010).

### 4. Pendanaan yang Berkelanjutan

Program pengelolaan sampah harus memiliki sumber pendanaan yang berkelanjutan. Pendanaan yang cukup memungkinkan program berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendanaan yang berkelanjutan adalah elemen vital untuk keberhasilan program pengelolaan sampah (Ansoff, 1987).

### 5. Pemantauan dan Evaluasi

Program harus mencakup mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Teori utama yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu model kesesuaian program oleh David C. Korten, terdapat tiga aspek kunci yang disebut sebagai model kesesuaian, yang menjadi kriteria keberhasilan penerapan suatu program. Ketiga aspek ini saling terkait, sehingga kegagalan atau keberhasilan dalam satu aspek dapat mempengaruhi aspek lainnya secara keseluruhan. Aspek-aspek ini

mencakup program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasarannya (Sarah, 2019). Dalam konteks kesesuaian program pengelolaan sampah, kriteria untuk setiap elemen dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Elemen Program**

Fokus utama yang ditekankan oleh Korten adalah keselarasan antara program dengan kebutuhan kelompok sasaran. Kesesuaian ini berperan penting dalam menentukan manfaat yang akan diperoleh oleh kelompok sasaran, sehingga menjadi aspek yang sangat vital. Jika program tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, dapat dipastikan bahwa hasilnya tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan memberdayakan masyarakat.

Untuk dapat memahami baik atau kurangnya suatu program harus memuat beberapa kriteria, yaitu:

- a) Tujuan yang jelas terlihat serta adanya kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut.
- b) Terdapat estimasi anggaran yang diperlukan.
- c) Strategi-strategi telah dipetakan untuk pelaksanaan program.

### **2. Elemen Pelaksana Program**

Korten menekankan pentingnya keselarasan antara program dan organisasi pelaksana. Ini mengimplikasikan bahwa tugas yang diberikan kepada organisasi pelaksana harus sejalan dengan kapasitasnya secara optimal. Jika organisasi pelaksana tidak mampu menjalankan tugas sesuai yang diminta oleh program, maka kesesuaian program tidak akan efektif. Ini bisa berdampak pada ketidakmampuan menyampaikan manfaat program, yang



pada akhirnya mempengaruhi pencapaian tujuan program yang diharapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap dan disposisi dari pelaksana yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik, yang mencakup:

- a. Pengetahuan dan Pengertian Pengelola (Kognisi)
- b. Sikap Pelaksana Terhadap Kesesuaian, Apakah Menerima atau Menolak
- c. Kekuatan dari Respon Pelaksana

### **3. Elemen Kelompok Sasaran**

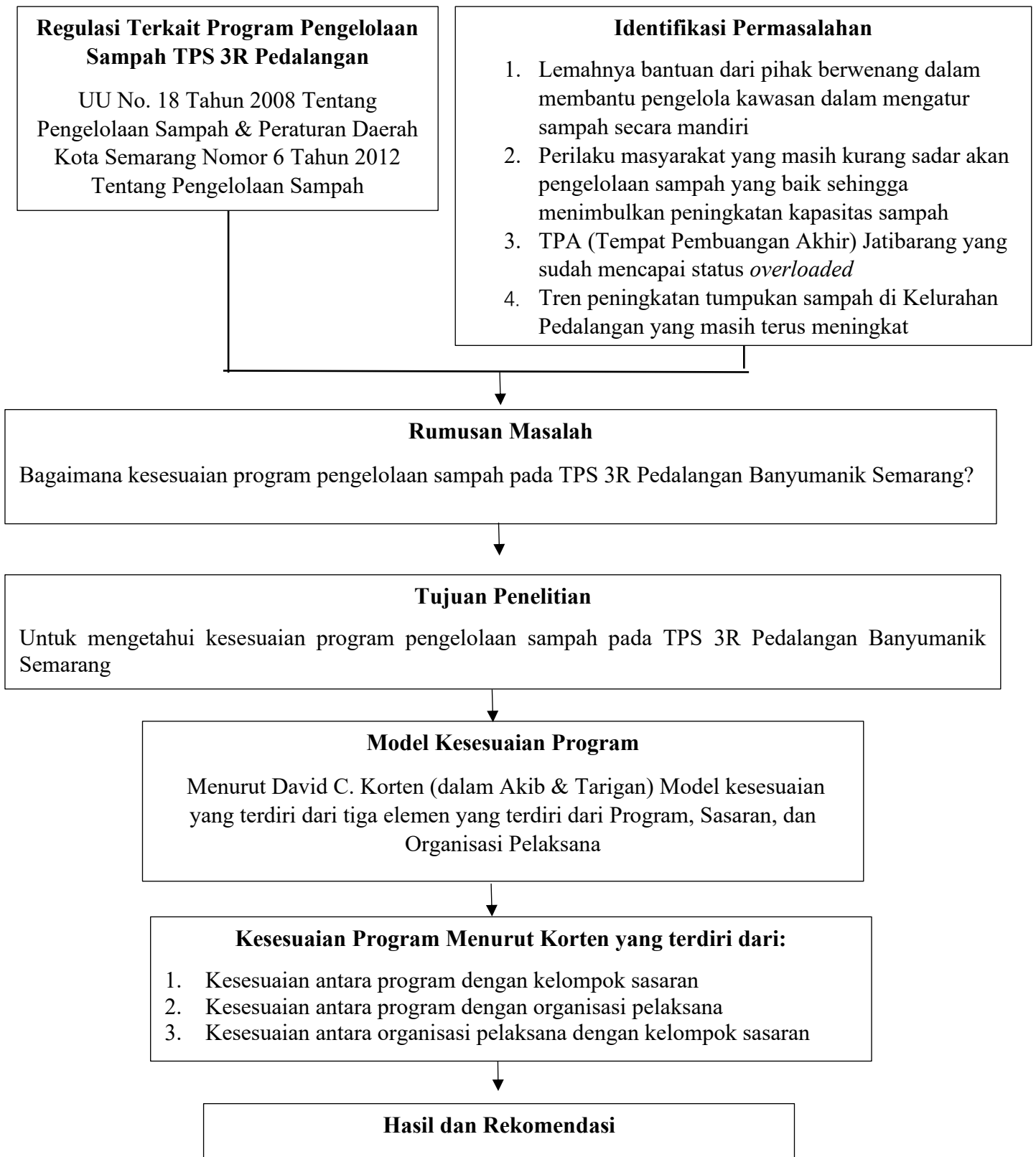
Korten menegaskan pentingnya untuk memperhatikan keselarasan antara program yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang dituju. Poin ini menggarisbawahi urgensi untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh kelompok sasaran, sehingga dapat memastikan bahwa program tersebut memberikan manfaat yang efektif bagi penerima manfaatnya.

Keselarasan ini menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan dan dampak yang berkelanjutan dari suatu program. Ada kemungkinan bahwa program tidak akan memberikan hasil yang diinginkan jika tujuan organisasi pelaksana tidak selaras dengan kebutuhan dan harapan populasi sasaran. Komunikasi yang efektif dan kerja sama yang erat antara pelaksana program dan kelompok sasaran sangat penting dalam situasi ini.

Kolaborasi yang baik memungkinkan untuk adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi kelompok sasaran, sehingga program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan relevan dengan konteks lokal. Selain itu, melalui kolaborasi yang erat, pelaksana program juga dapat memperoleh

masukan yang berharga dari kelompok sasaran, yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

## 1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis



## **1.8 Fenomena Penelitian**

Fenomena penelitian terkait Analisis Kesesuaian Program Pengelolaan Sampah pada TPS 3R Pedalangan Banyumanik Semarang ditinjau dari regulasi yang mengatur TPS 3R, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan model kesesuaian David C. Korten (dalam Akib & Tarigan, 2008) yaitu dengan model kesesuaian program yang terdiri dari Program, Sasaran, dan Organisasi Pelaksana. Alasan peneliti menggunakan model kesesuaian dari David C. Korten didasari oleh tiga elemen yang dikemukakan dapat meliputi dan juga sesuai dengan permasalahan yang peneliti ingin untuk teliti dengan memperdalam faktor-faktor kesesuaian yang terjadi.

Kesesuaian bertindak dalam mengubah keputusan-keputusan yang terjadi menjadi pola-pola operasional. Fenomena yang akan dikaji dalam terkait fokus penelitian adalah:

### **1. Elemen Program**

Kriteria yang akan diamati dalam elemen program memuat beberapa aspek diantaranya:

1. Pengurangan volume sampah di Kelurahan Pedalangan yang berhasil dikelola TPS 3R Pedalangan
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat Kelurahan Pedalangan dalam pengelolaan sampah
3. Peningkatan kualitas hidup pada lingkungan Kelurahan Pedalangan
4. Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien pada TPS 3R Pedalangan

5. Pengembangan Ekonomi Lokal, yaitu Kelurahan Pedalangan dalam daur ulang sampah

## **2. Elemen Pelaksana Program**

Kriteria yang akan diamati dalam elemen pelaksana program memuat beberapa aspek diantaranya:

1. Pelaksanaan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Petugas TPS 3R Kelurahan Pedalangan sebagai implementor program TPS 3R Pedalangan
2. Kejelasan prosedur dan pemahaman agen pelaksana program TPS 3R Pedalangan
3. Arah respon pengelola TPS 3R Pedalangan terhadap pelaksanaan TPS 3R Pedalangan
4. Intensitas dari pengelola TPS 3R Pedalangan
5. Proses pengawasan yang dilakukan koordinator TPS 3R Pedalangan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di TPS 3R Pedalangan

## **3. Elemen Kelompok Sasaran**

Kriteria yang akan diamati dalam elemen kelompok sasaran memuat beberapa aspek diantaranya:

1. Tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Pedalangan terhadap program dan tujuan program TPS 3R Pedalangan
2. Harapan masyarakat Kelurahan Pedalangan terhadap pelaksanaan TPS 3R Pedalangan

3. Kesesuaian pelaksanaan program TPS 3R Kelurahan Pedalangan dengan keinginan masyarakat Pedalangan.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Desain Penelitian**

Tujuan penelitian yang terkait dengan topik yang diteliti, metodologi penelitian yang dipilih akan bersifat deskriptif, menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi peneliti dengan informan, serta memfasilitasi adaptabilitas terhadap berbagai pengaruh, pola, dan nilai-nilai yang dihadapi. Penelitian deskriptif, dalam konteks ini, berarti melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap tema yang diangkat. Data yang dikumpulkan akan terdiri dari narasi teks, gambar, bukan angka-angka.

Moleong (2019: 06) memaparkan penjelasan terkait Pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang dipelajari oleh subjek penelitian adalah tujuan dari penelitian kualitatif. Ada beberapa aspek dalam fenomena ini, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Pendekatan ini berusaha menggambarkan fenomena tersebut secara holistik, atau menyeluruh, dengan menggunakan deskripsi yang dipaparkan dengan berupa narasi atau pembahasan lainnya. Penelitian ini dilakukan dalam konteks tertentu yang bersifat alami, artinya peneliti berupaya memahami fenomena tersebut dalam lingkungan yang sebenarnya tanpa manipulasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian kualitatif memanfaatkan berbagai metode alamiah, seperti observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, sehingga data yang dihasilkan lebih kaya dan mendalam.

Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti pertama-tama melakukan eksplorasi awal untuk memahami konteks dan isu-isu utama, kemudian mengumpulkan data secara mendalam dan komprehensif. Tujuannya adalah untuk mengembangkan hipotesis yang menjelaskan hubungan antara fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan detail, memungkinkan deskripsi yang mendalam mengenai kesesuaian program pengelolaan sampah pada TPS 3R Pedalangan. Lokus khususnya pada TPS 3R Pedalangan Banyumanik, untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci dan kontekstual.

### **1.9.2 Subjek Penelitian**

Informan dalam penelitian ini mencakup berbagai pihak yang memiliki hubungan langsung dengan lokasi penelitian. Informan kunci atau narasumber utama terdiri dari aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di wilayah TPS 3R Pedalangan Banyumanik, Kota Semarang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam dan menyeluruh mengenai kesesuaian program pengelolaan sampah pada TPS 3R Pedalangan.

Guna lebih memperdalam temuan penelitian yang nantinya bisa dijadikan pijakan kuat secara ilmiah, peneliti juga melibatkan beberapa informan dari unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Pengelola TPS 3R Pedalangan dan juga masyarakat sekitar dari Kelurahan Pedalangan.

### **1.9.3 Sumber Data**

Menurut Hasan (2020: 82), data merupakan informasi atau fakta yang dijelaskan dengan angka, simbol, kode, dan sebagainya. Sumber data, di sisi lain, merujuk pada subjek dari mana data atau informasi tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk data primer dan sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Data Primer Sumber**

Data primer merupakan informasi yang didapatkan langsung dari sumber yang berinteraksi langsung dengan peneliti, memastikan kejelasan dan validitas informasi yang diberikan. Dalam penelitian Analisis Kesesuaian Program Pengelolaan Sampah Pada TPS 3R Pedalangan Data primer dikumpulkan melalui:

##### **a) Informan**

Informan merupakan individu yang menyediakan wawasan mengenai situasi dan kondisi yang relevan dengan penelitian yang terdiri dari pengelola TPS 3R Pedalangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dan Masyarakat Kelurahan Pedalangan.

##### **b) Peristiwa**

Kejadian di lokasi penelitian didefinisikan sebagai fenomena atau peristiwa yang disaksikan atau dialami di sana, dalam konteks penelitian ini peristiwa diamati pada TPS 3R Pedalangan dan Kelurahan Pedalangan.



## **2. Data Sekunder**

Informasi yang berasal dari sumber selain pengumpul data-seperti bahan tertulis atau orang lain-disebut sebagai data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian ini terdiri dari berbagai catatan dan arsip terkait serta sumber-sumber kepustakaan. Selain itu, artikel-artikel yang berhubungan dengan program pengelaan sampah TPS 3R oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan pengelola TPS 3R Pedalangan yang dikumpulkan dan dianalisis. Informasi dari data sekunder ini memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang kebijakan yang sedang diteliti, serta membantu memperkuat dan melengkapi temuan dari data primer.

### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut (Sugiyono, 2017) Pengumpulan data merupakan tahapan yang paling strategis dalam penelitian ini, mengingat tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data yang relevan dan valid. Oleh karena itu, proses ini menjadi sangat krusial dan memerlukan pendekatan yang tepat untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup berbagai metode yang dirancang untuk memperoleh data secara komprehensif dan mendalam, meliputi::

#### **1) Wawancara Tidak Terstruktur**

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara informal tanpa menggunakan panduan wawancara yang komprehensif dan disusun secara metodis. Satu-satunya hal yang disertakan dalam petunjuk wawancara adalah ringkasan subjek yang akan dibahas.

Metode ini melibatkan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak yang relevan. Dalam rangka mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topik penelitian, peneliti melakukan komunikasi langsung dengan informan selama fase ini. Informan pada penelitian ini mencakup pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, pegawai TPS 3R Pedalangan, dan masyarakat Kelurahan Pedalangan.

## **2) Dokumentasi**

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup proses pencatatan secara sistematis dan pemanfaatan data yang telah tersedia di instansi terkait penelitian. Data tersebut mencakup dokumen dan arsip yang memiliki relevansi langsung dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, sumber utama data yang digunakan berasal dari TPS 3R Pedalangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teliti untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat memberikan dukungan yang memadai bagi analisis kesesuaian kebijakan pengelolaan sampah perkotaan.

Tujuan utama dari pengumpulan data ini adalah untuk mengumpulkan bukti empiris yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut, serta untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan sampah di lingkungan Kelurahan Pedalangan. Data yang

terkumpul ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan dan perbaikan sistem pengelolaan sampah di masa mendatang.

### **3) Observasi**

Melakukan observasi langsung dan mencatat data adalah langkah penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti mencakup: a) Pencatatan Relevan: Menulis catatan rinci tentang aspek-aspek yang terkait langsung dengan permasalahan penelitian; b. Dokumentasi Kegiatan: Mengambil foto, video, atau membuat deskripsi tertulis dari aktivitas yang diamati selama penelitian; c. Pengumpulan Arsip: Mengumpulkan laporan, dokumen resmi, dan catatan lainnya yang relevan dengan penelitian dari lokasi penelitian. Dengan metode ini, peneliti dapat memastikan data yang diperoleh akurat, komprehensif, dan mendukung analisis yang mendalam mengenai isu yang diteliti.

#### **1.9.5 Analisis Data**

Bogdan dan Taylor mengartikan analisis data sebagai suatu proses yang mendetail dan komprehensif, yang mencakup usaha sistematis dalam mengidentifikasi tema dan mengembangkan hipotesis kerja berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga melibatkan upaya untuk memberikan dukungan dan validasi terhadap tema dan hipotesis tersebut. Menurut mereka, analisis data tidak hanya berhenti pada tahap pengembangan hipotesis, tetapi juga mencakup langkah-langkah untuk mengkonfirmasi dan memperkuat temuan yang telah diidentifikasi. Hal ini diungkapkan oleh Moleong dalam bukunya yang diterbitkan

pada tahun 2012 Proses analisis data memerlukan pengaturan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumen secara terorganisir (Sugiyono, 2017). Proses ini mencakup pengkategorian data, pemecahan data menjadi unit-unit, sintesis, penyusunan pola, penentuan aspek yang signifikan, serta penarikan kesimpulan agar informasi tersebut dapat dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Miles dkk (2014: 14) menekankan kontinuitas alur kegiatan dalam analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses yang berlangsung terus menerus dari awal hingga akhir penelitian. Proses ini terdiri dari tiga aktivitas yang saling berhubungan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan.

### **1) Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap ini mencakup penerapan yang berputar dari ketiga metode tersebut dengan tujuan mencapai kejenuhan data. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh adalah menyeluruh dan maksimal. Melalui wawancara, peneliti dapat mengumpulkan informasi langsung dari narasumber. Observasi atau pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat langsung fenomena yang diteliti. Dokumentasi, di sisi lain, memberikan akses ke berbagai dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian. Gabungan dari ketiga teknik ini memberikan data yang kaya dan beragam, yang sangat penting untuk analisis yang mendalam.

## **2) Reduksi data**

Data dari notulensi penelitian lapangan, naskah wawancara, dokumen, dan data empiris lainnya dipilih, dipersempit, disederhanakan, dan ditransformasikan selama proses kondensasi data. Melalui proses seleksi, ringkasan, atau penjelasan dengan menggunakan bahasa yang relevan, data kualitatif dapat diubah. Peneliti akan menemukan tema, pola, dan data yang penting dengan menggunakan data yang sudah ada; materi yang tidak perlu akan dibuang.

## **3) Penyuguhan data**

Data tersebut kemudian disajikan oleh peneliti. Tahap reduksi dari penyajian data telah selesai. Tujuan dari penyajian data yaitu agar mempermudah penulis dalam memahami masalah yang diangkat oleh penelitian dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Penyajian data secara umum merupakan suatu susunan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data dapat disajikan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk skema, bagan, dan ringkasan ringkas.

## **4) Pengambilan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan jika tahap penyajian dan kondensasi data telah selesai dilakukan. Untuk sampai pada temuan, peneliti harus terlebih dahulu mengevaluasi data yang telah dikumpulkan, mengidentifikasi pola, dan memberikan deskripsi

interpretasi. Membuat kesimpulan adalah bukti dari penelitian yang dilakukan.

### **1.9.6 Kualitas Data**

Menurut Sugiyono (2020), penelitian harus memiliki kualitas data yang dapat dipertanggungjawabkan guna mengukur keberhasilan dalam mengeksplorasi masalah terhadap hasil dalam penelitiannya. Terdapat tiga macam triangulasi untuk pemeriksaan penelitian sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber: Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapat dari berbagai sumber.
2. Triangulasi Teknik: Uji Kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data dengan teknik yang berbeda kepada sumber yang sama
3. Triangulasi Waktu: Pengambilan data yang disesuaikan dengan situasi penyedia informasi tersebut.

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, teknik ini berasal dari berbagai sumber seperti hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil analisis dari dokumentasi yang terkait TPS 3R Pedalangan, lalu peneliti mengolah kembali data yang di dapat dan setelah peneliti mengolah data atau informasi tersebut akan dilakukan konfirmasi kembali kepada informan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dengan informan.